

**Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi  
Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol  
Islam Pada Pilkada Sumenep 2020**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam



**Oleh:**

**Khalilurrahman**

**NIM: E91217082**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Khalilurrahman

NIM : E91217082

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2022.

Yang tertanda,



Khalilurrahman

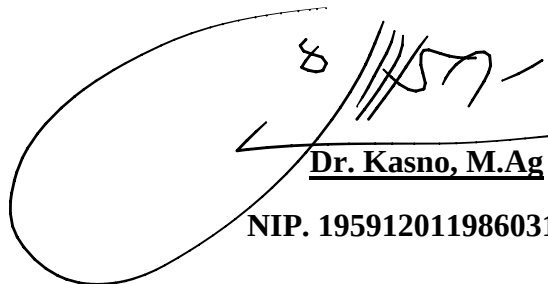
NIM. E91217082

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Symbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020” yang ditulis oleh Khalilurrahman (E91217082) telah disetujui pada tanggal 10 Januari 2022.

Surabaya, 10 Januari 2022.

Pembimbing,



**Dr. Kasno, M.Ag**  
**NIP. 195912011986031006**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Symbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020” yang ditulis oleh Khalilurrahman ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Januari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Kasno, M.Ag

(Ketua)

2. Dr. Suhermanto, M. Hum

(Penguji I)

3. Dr. Tasmuji, M.Ag

(Penguji II)

4. Muchammad Helmi Umam, M. Hum

(Penguji III)

Surabaya, 15 Januari 2022.

Dekan



Dr. Munawir, M. Ag

NIP. 19640918199203100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khalilurrahman

NIM : E91217082

Fakultas/Jurusan: Aqidah dan Filsafat Islam

E-mail address : lylurdayner123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap  
Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus  
Penggunaan Simbol-Symbol Islam Pada Pilkada Sumenep  
2020.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

  
(Khalilurrahman)



## DAFTAR ISI

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                            | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                  | iii       |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                     | iv        |
| PERNYATAAN PUBLIKASI .....                                   | v         |
| ABSTRAK .....                                                | vi        |
| KATA PENGANTAR .....                                         | vii       |
| DAFTAR ISI.....                                              | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                |           |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1         |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....                     | 4         |
| C. Rumusan Masalah .....                                     | 5         |
| D. Tujuan Penelitian .....                                   | 5         |
| E. Manfaat Penelitian.....                                   | 5         |
| F. Kerangka Teoritis .....                                   | 6         |
| G. Kajian Terdahulu.....                                     | 6         |
| H. Metode Penelitian .....                                   | 8         |
| I. Sistematika Pembahasan.....                               | 12        |
| <b>BAB II KAJIAN FENOMENOLOGI DAN KOMODIFIKASI POLITIK..</b> | <b>13</b> |
| A. Kajian Fenomenologi: Umum dan Husserl.....                | 13        |
| 1. Asal Usul Teori Fenomenologi.....                         | 13        |
| 2. Fenomenologi Menurut Edmund Husserl.....                  | 15        |
| 3. Pendekatan Fenomenologi Edmund Husserl.....               | 19        |







Umat Islam menjadi sasaran utama mengingat secara sosiologis dan politik sangat kuat. Di Sumenep misalnya umat Islam begitu sangat dominan sehingga partai politik (bukan hanya partai politik Islam) berebut dengan pemilih yang sama. Apalagi, mayoritas pemilih (Islam) tergolong pemilih konvensional dan loyal (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) yang sangat fanatik dalam beragama. Selain mayoritas pemilih adalah umat Islam, para calon yang diusung partai politik juga berasal dari kalangan muslim.

Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang membentuk manusia menjadi *homo symbolicus* dalam tipe atau pola religiusnya. Dalam agama, simbol selalu hadir menjadi bagian yang sangat penting bagi para pemeluknya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem simbol. Lebih jauh, Geertz menekankan bahwa simbol tersebut menciptakan kondisi emosi yang kuat, menyebar, dan bertahan lama. Meskipun simbol memiliki kedudukan penting dalam agama dan bagi pemeluknya, tidak semua simbol selalu dapat

[illegible]

Kedudukan simbol agama yang secara signifikan membawanya pada persoalan komodifikasi agama. Simbol-simbol agama dikomersialisasikan di ruang publik demi memperoleh keuntungan. Komodifikasi agama saat ini telah menyebar ke masyarakat luas di banyak Negara. Di masyarakat Islam Indonesia secara umum dan masyarakat Islam Sumenep secara khusus, komodifikasi agama semakin tampak jelas, di mana Islam ditransformasi menjadi komoditi simbolis. Lebih jauh, interaksi antara Islam dan demokrasi menyebabkan simbol Islam menjadi penting dalam dinamika politik lokal.<sup>3</sup> Karena simbol-simbol agama mampu melegitimasi kekuatan elite politik sebagai bentuk dari perlawanan terhadap oposisi termasuk militan Islam. Mobilisasi simbol agama memberikan pengaruh besar pada arena perpolitikan lokal di Sumenep. Para elite yang memiliki latar belakang santri mampu memberikan efek nyata yakni negosiasi ulang batas-batas kekuatan politik, pengaturan ekonomi, serta identitas diri. Tentu saja hubungan dengan para tokoh-tokoh agama dan pesantren juga menjadi modal besar dalam menarik simpati masyarakat muslim secara khusus.

<sup>3</sup>Hasse J. “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2 (2016), 179-186.

Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) Sumenep begitu sangat kental dengan muatan polarisasi simbol-simbol agama, secara khusus Islam. Tiap pasangan calon seolah-olah didesain menjadi tokoh yang sangat agamis, religius bahkan paling Nahdliyin. Kesan yang ditonjolkan bahwa mereka berangkat dari kalangan ulama, dekat dengan para kiai, dilahirkan dari rahim pesantren, keturunan tokoh agama.<sup>4</sup> Sehingga predikat yang seringkali disematkan adalah Gus, Lora dan Kiai muda. Semakin banyak dukungan dari para ulama menjadi kekuatan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia adalah figur yang layak untuk memimpin Sumenep.

Dengan adanya latar belakang di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Oleh sebab itu butuh adanya identifikasi dan batasan-batasan masalah sebagai acuan dari penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

[illegible]

- ### C. Rumusan Masalah

- ### D. Tujuan Penelitian

- ### E. Manfaat Penelitian

[illegible]

Dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah teori sebagai tindakan untuk memecahkan permasalahan secara mendalam.

## G. Kajian Terdahulu

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Mujibur Rahman yang berjudul Visualisasi Agama di Ruang Publik, di mana dalam kajian ini menjelaskan bahwa komodifikasi agama membawa wajah baru agama ke level yang belum pernah

dicapai sebelumnya, tepatnya sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, dan juga menjadi tugas para pemeluk agama untuk memahami agama sebagai penuntun jalan hidup bukan mendistorsinya menjadikan hal-hal yang bersifat pragmatis.<sup>5</sup>

## H. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

### b. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, elite partai politik serta masyarakat Sumenep yang terlibat langsung terhadap dinamika prosesi Pilkada Sumenep 2020. Namun peneliti memfokuskan kepada tokoh agama, politisi, serta tokoh masyarakat Sumenep yang dianggap obyektif

### c. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Di samping itu, agar memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

Wawancara merupakan kategori penting dalam suatu penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka maupun dengan menggunakan sosial media. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk dapat dikonstruksikan sebuah makna dalam topik tertentu.<sup>8</sup>

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa observasi ialah proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

[illegible]

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 63.

1. Deduksi, yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum, pendapat-pendapat, ide-ide untuk dijadikan pisau analisa terhadap data yang dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa.<sup>12</sup>
2. Induksi yaitu menarik data di lapangan kepada teori-teori atau aturan-aturan yang digunakan oleh penulis.
3. Verifikasi, yaitu mencocokkan data yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penulisan, Kajian Terdahulu, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran umum Pilkada Sumenep 2020, letak geografis penelitian, temuan penelitian dan deskripsi subyek penelitian.

[illegible]



## BAB II

## KAJIAN FENOMENOLOGI DAN KOMODIFIKASI POLITIK

## A. Kajian Fenomenologi: Umum dan Husserl

## 1. Asal Usul Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phainomenon* yang merujuk pada arti “yang menampak”. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya, seperti Jean Paul Sartre. Selanjutnya Sartre memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar.<sup>1</sup>

Menurut Hegel, fenomena yang kita alami dan tampak pada kita merupakan hasil kegiatan yang bermacam-macam dan runtutan konsep kesadaran manusia serta bersifat relatif terhadap budaya dan sejarah. Husserl menolak pandangan Hegel mengenai relativisme fenomena budaya dan sejarah, namun dia

<sup>1</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34-45

Fenomenologi merupakan filosofi dan sekaligus suatu pendekatan metodologi dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Hakekatnya, fenomenologi berkenaan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian, dunia intersubyektif (dunia kehidupan) atau juga disebut *lebenswelt*. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *phanamenon* yang berarti fenomena atau sesuatu yang tampak dan terlihat. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai istilah gejala. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrick Lambert, sedangkan tokoh pelopor fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938).<sup>3</sup>

<sup>2</sup>*Ibid*, 62.

<sup>4</sup>*Ibid*, 89.

Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filosof berkebangsaan Jerman, Edmund Husserl. Istilah fenomenologi secara etimologi berasal dari kata *fenomena* dan *logos*. *Fenomena* berasal dari kata kerja Yunani "*phainesthai*" yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom*, dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 64.

<sup>6</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 116-117.

Kabut yang menyelimuti realitas bukan semata-mata dari pihak realitas saja, melainkan juga dari pihak yang melihat realitas. Konsepsi-konsepsi manusia, cara berfikir, suasana hidup dan latar belakangnya sering menjadi kabut tebal dalam melihat realitas. Konsepsi-konsepsi, cara berfikir, suasana hidup dan latar belakang yang menjadi kabut orang melihat realitas itu ternyata tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi kadang ditanam, dimasukkan ke dalam sanubari oleh zaman yang dialami. Husserl menyarankan agar manusia sampai kepada realitas maka harus melepaskan diri dari berbagai kegelapan itu dan menerobos kabut. Istilah Husserl, "*Nach den Sachen Selbst*" yang artinya kita harus menerobos kabut sampai ke realitas yang sesungguhnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Mary Warnock, *Existensialism*, (New York & Oxford: Oxford University Press, 1989), 26.  
<sup>8</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 116-117.

a). Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak

c). Kesadaran bersifat intensional

d).Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (*noesis*) dengan objek yang disadari (*noema*).

Proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam fenomenologi. Interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu pengalaman.<sup>9</sup> Menurut tradisi fenomenologi, interpretasi merupakan realitas bagi seorang individu. Dengan demikian proses interpretasi akan terus berkembang dan berubah-ubah sepanjang manusia itu hidup antara pengalaman dengan makna yang diberikan setiap kali menemui pengalaman baru. Dalam tradisi fenomenologi ini terbagi lagi ke dalam tiga bagian<sup>10</sup> yaitu:

a). fenomenologi klasik.

b). fenomenologi persepsi.

c). fenomenologi hermenetik.

Tokoh penting dalam teori fenomenologi persepsi adalah Maurice Merleau-Ponty yang pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi (*phenomenology of perception*) yang dinilai sebagai penolakan terhadap pandangan objektif namun sempit dari Husserl.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Yogyakarta: Gramedia, 2001), 40.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid*, 42.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).<sup>14</sup> Persepsi kita bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, personal, situasional, fungsional dan struktural. Di antara faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsikan sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional dan konsep struktural.<sup>15</sup> Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui seseorang adalah apa yang dialaminya. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki seseorang yang bersangkutan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Yogyakarta: Gramedia, 2001), 39.

### 3. Pendekatan Fenomenologi Edmund Husserl

<sup>17</sup>Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 36.

Bila dibandingkan dengan konsep kesadaran dari Descartes yang bersifat tertutup, kesadaran menurut Husserl lebih bersifat terbuka. Husserl juga menolak pandangan Hegel mengenai relativisme fenomena budaya dari sejarah. Namun dia menerima konsep formal fenomenologi Hegel, serta menjadikannya sebagai dasar perkembangan semua tipe fenomenologi. Fenomena pengalaman adalah apa yang dihasilkan oleh kegiatan dan susunan kesadaran manusia. Dalam *Logical investigations*, Husserl menggarisbawahi sebuah sistem yang kompleks dari filsafat. Sistem tersebut bergerak dari logika ke filsafat bahasa baru kemudian ke ranah ontologi. Pembahasannya tidak berhenti sampai di sini, dari ontologi bergerak ke “kesengajaan” dan berakhir di fenomenologi pengetahuan. Barulah di *Ideas I*, Husserl mengkhususkan pembahasannya pada fenomenologi, yang mendefinisikannya sebagai ilmu mengenai pokok-pokok kesadaran (*the science of the essence of consciousness*).<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 9.

Husserl berpendapat bahwa ilmu positif memerlukan pendamping pendekatan filsafat fenomenologis. Pemahamannya diawali dengan ajakan kembali pada sumber atau realitas yang sesungguhnya. Untuk itu perlu langkah-langkah metodis “reduksi” untuk menempatkan fenomena dalam keranjang (*bracketing*) atau tanda kurung. Melalui reduksi, terjadi penundaan upaya menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Adapun langkah-langkah metodis yang dimaksud adalah Reduksi Eidetis, Reduksi Fenomenologi, dan Reduksi Transedental. Dengan menempatkan fenomena dalam tanda kurung, berarti kita menempatkan perhatian kita dalam struktur pengalaman sadar. Kata kuncinya adalah membedakan apakah kesadaran itu bagian dari kesengajaan, ataukah karena terhubung langsung dengan sesuatu. Misalnya kesadaran kita akan

[illegible]

Melalui reduksi transedental, Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Setiap aktivitas intensionalitas (*noetic*) termasuk aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektifnya, yakni objek yang disadari. Yang paling penting dalam reduksi ini, bukan terletak pada persoalan menempatkan penampakan fenomena dalam tanda kurung, melainkan pada bagaimana subjek memberikan interpretasi terhadap objek selanjutnya. Pengamatan Husserl mengenai struktur intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran, yaitu: objektifikasi, identifikasi, korelasi, dan konstitusi.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>*Ibid*, 14.

Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistik, karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Ilmu komunikasi (komunikologi) akan mendapatkan landasan yang kokoh jika asumsi-asumsi ontologi dan epistemologinya didasarkan pada pengetahuan tentang esensi kesadaran. Konsepsi Husserl tentang “aku transedental” dipaharni sebagai subjek absolut, yang seluruh aktivitasnya adalah menciptakan dunia. Namun Husserl tidak menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya, subjek atau kesadaran itu selain mengkonstitusikan dunia, juga dikonstruksikan oleh dunia.<sup>23</sup>

*Pertama, epoche.* Husserl menggunakan istilah ini untuk term bebas dari prasangka. Dengan *epoche* kita menyampingkan penilaian, bias, dan pertimbangan awal yang kita miliki terhadap suatu objek. Dengan kata lain, epoche adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Oleh karena epoche memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, maka dengan epoche kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaran, dan pemahaman yang baru.

<sup>22</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 42.  
<sup>23</sup>*Ibid.*



<http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis>. Diakses 27/10/2021

## 2. Nilai-Nilai Agama

Secara bahasa, agama mengandung pengertian menguasai, ketaatan, serta balasan. Sedangkan secara terminologi agama diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, norma, hukum dan tata cara hidup manusia dengan Tuhan dan sesamanya yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Alo Liliweri, *Makna Budaya Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 108.

[illegible]

Menurut Sururin nilai-nilai dalam agama Islam terdapat tiga paradigma yang perlu dikembangkan, yakni akidah, akhlak dan syariah.<sup>33</sup> Hakikat suatu nilai dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, alam, serta mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, yang dapat dijabarkan dengan luas dalam konteks Islam. Penempatan posisi nilai yang tertinggi ini adalah Tuhan, juga dianut oleh kaum filosofis idealis tentang adanya hirarki nilai. Menurut kaum idealis ini, nilai spiritual lebih tinggi dari nilai material. Kaum idealis menempatkan nilai agama pada posisi yang tinggi, karena menurut mereka nilai-nilai ini akan membantu kita merealisasikan tujuan kita pada tataran yang lebih tinggi, penyatuan dengan tatanan spiritual.<sup>34</sup>

Komodifikasi dapat diartikan sebagai proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi sebuah komoditas yang berorientasi pada nilai tukar sesuai dengan keinginan masyarakat, maka dalam tahap transformasi ini pasti

<sup>34</sup>Muhamadayeli, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), 91.



- 1) Komodifikasi instrinsik, yaitu proses yang dilakukan oleh media dalam pertukaran rating, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui karakteristik khalayak, dan keinginan spesifik dari masing-masing orang. Karena rating sebagai satu-satunya tolok ukur dalam melihat keberhasilan sebuah program dalam industri, dan juga untuk menilai konteks atau produk yang disajikan oleh media, apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi dan dipilih.
- 2) Komodifikasi Ekstrinsik, sebuah proses yang terjadi dan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, budaya, telekomunikasi dalam perluasannya. Disamping itu, komodifikasi ini merupakan transformasi dari ruang umum menjadi kepemilikan privat seperti yang diwujudkan lewat iklan-iklan komersial.
- 3). Komodifikasi buruh atau yang biasa dikenal dengan komodifikasi tenaga kerja, adalah sebuah proses untuk mengkaji proses komodifikasi isi dan khalayak media, maka dalam menghadapi ini para pekerja media menanggapi dengan menggalang orang-orang dari media berbeda untuk bergabung dalam serikat pekerja dan organisasi-organisasi pekerja lain yang diklaim dapat mempersentasikan segmen terbesar tenaga kerja. sehingga dengan demikian keahlian dan jam kerja para pekerja dijadikan komoditas dan dihargai dengan gaji. Maka dalam tindakan proses komodifikasi, tindakan modal untuk memisahkan konsepsi dari eksekusi, keterampilan dari kemampuan untuk melaksanakannya.

#### 4. Pengertian Islam dan Politik

Istilah politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang memiliki arti kota dan Negara. Kata “polis” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “politis” yang berarti warga Negara dan “politikus” yang berarti kewarganegaraan.<sup>39</sup> Dalam suatu sistem dan tatanan politik suatu Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan serta pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara

<sup>39</sup>A.P. Cowie, *Oxford Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), 190.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Menurut Taufik Abdullah, sikap dan perilaku budaya politik yang memakai kata sifat Islam bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrin terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.<sup>41</sup> Senada dengan apa yang dikemukakan Din Syamsuddin, Azyumardi, pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut. Pertarungan seperti ini melibatkan objektivikasi pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan.<sup>42</sup>

Islam dan politik mempunyai titik singgung yang cukup erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara

<sup>42</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 12.

Dalam konteks Indonesia, relasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi. Ini tidak berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur-unsur Islam dalam percaturan politik di tanah air. Se jauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam kancah politik, tergantung pada kalangan tokoh-tokoh muslim yang mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik memetakan dan menganalisis transformasi sosial.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 32.  
<sup>44</sup>*Ibid*, 33.

Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; Pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam seringkali termarginalkan dalam wilayah kehidupan politik di Negara yang bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia. Namun demikian Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena “politik Islam” dan “non politik Islam” di kalangan umat Islam Indonesia yang telah berlangsung lama.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Zaki ulya, “Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqih Siyasyah)”, *jurnal al-qadha*, Vol. 2, No. 2, (2015), 27.

[illegible]

## 6. Penggunaan Simbolisasi Islam di Ruang Publik

Agama membutuhkan simbol untuk menunjukkan keberadaannya atau eksistensinya yang religius sehingga mampu dan nampak kepada orang awam. Seperti halnya salib, ka'bah, dan lainnya. Simbol-simbol ini menghasilkan imagologi atau menampilkan agama tertentu sebagai religi yang fundamental. Adapun penggunaan simbolisasi agama di ruang publik ini sering terjadi dalam relasi iklan politik, karena dengan adanya simbol-simbol yang digunakan oleh para politisi memiliki orientasi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Karena simbol merupakan tanda yang memberikan gambaran mengenai identitas tentang agama tersebut.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>*Ibid.*

untuk dapat menarik simpati masyarakat, seperti halnya slogan Bismillah melayani, Barokah, Amanah, dan lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyadarkan dan memberikan informasi bahwa mereka betul-betul figur yang memperhatikan terhadap ajaran-ajaran agama.

Disamping itu juga dengan atribut (fisik dan non fisik) seperti halnya penggunaan foto yang terdapat di beberapa sudut dengan kostum islami, ditampilkan dengan berbagai aksesoris yang selama ini melekat pada seorang muslim sejati. Konstruksi elemen tanda yang digunakan oleh seseorang merupakan tampilan yang memberi kesan bahwa dalam diri mereka akan selalu menghidupkan nilai-nilai keagamaan. Jadi dapat dipahami bahwa simbol agama sebagai elemen untuk membangkitkan semangat religius dan gairah masyarakat dalam memperjuangkan sosok figur yang Islami. Simbol agama yang dikemas oleh para figur menjadi fakta dan realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya simbol-simbol agama dalam iklan tersebut menggiring masyarakat untuk menuju pada pendangkalan simbol-simbol agama itu sendiri.

## BAB III

## GAMBARAN UMUM PILKADA SUMENEP TAHUN 2020

## A. Deskripsi Lokasi Penelitian

## 1. Profil Sumenep

Sumenep merupakan salah satu nama Kabupaten yang terdapat di ujung timur pulau Madura. Penyebutan istilah Sumenep dalam bahasa Madura lebih populer dikenal dengan istilah “Songenep”. Jumlah populasi penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.100.821 jiwa dengan luas wilayah 2.094,48 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Letak wilayah Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura ini berada di titik koordinat 7° 1' 27.3" S, 113° 53' 24.74" E-7.02425, 113.890206. Secara etimologi, nama Sumenep diambil dari bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nama tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata “sung” dan “eneb”. Kata “sung” memiliki arti sebuah relung, cekungan atau lembah, sedangkan kata “eneb” memiliki arti endapan yang tenang.

Jadi nama Songenep bilamana diartikan berdasarkan gabungan dari dua kata di atas memiliki arti lembah atau cekungan yang tenang. Hal ini sebagaimana disinggung dalam kitab Pararaton bahwa penyebutan kata Songenep sebenarnya sudah populer sejak kerajaan Singasari di mana pada saat sang Prabu Kertanegara mendelegasikan Arya Wiraraja (seorang penasehat kerajaan dalam bidang politik

<sup>1</sup>Website kabupaten Sumenep dalam <https://www.sumenepkab.go.id>. Diakses 28/10/2021.

yang terletak di ujung timur pulau madura ini juga memiliki semboyan yang dikenal dengan istilah “sumekar”. Semboyan ini merupakan akronim dari dua suku kata “Sumenep” dan “Karaton”. Dengan semboyan tersebut mengisyaratkan bahwa Kabupaten Sumenep secara historis memiliki hubungan yang cukup erat dengan sistem kerajaan. Hal ini wajar mengingat sejarah Sumenep merupakan daerah yang terdapat banyak karaton dan juga sebagai pusat pemerintahan sang Adipati waktu dulu.<sup>3</sup>

Wilayah Sumenep berada diujung timur pulau Madura dengan letak geografis di antara  $113^{\circ} 32'$  -  $116^{\circ} 16'$  bujur timur dan  $4^{\circ} 55'$  -  $7^{\circ} 24'$  lintang selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- <sup>2</sup>Iskandar Zulkarnaen, *Sejarah Sumenep*, (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2003), 17.

tara adalah pulau Karamian yang terletak di ke  
151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pul  
akala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari pelabua  
administratif Kabupaten Sumenep merupak  
wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep ter  
3 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah k  
Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kor  
kota Sumenep.<sup>5</sup>

arkan dari hasil Sensus penduduk tahun 201  
menep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri da  
416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah  
012 jiwa dan 200 desa/kelurahan.

tara adalah pulau Karamian yang terletak di ke  
151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pul  
akala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari pelabua  
administratif Kabupaten Sumenep merupak  
wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep ter  
3 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah k  
Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kor  
kota Sumenep.<sup>5</sup>

arkan dari hasil Sensus penduduk tahun 201  
menep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri da  
416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah  
012 jiwa, dan 1.142.012 jiwa penduduk.

tara adalah pulau Karamian yang terletak di ke  
151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pul  
akala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari pelabua  
administratif Kabupaten Sumenep merupak  
wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep ter  
3 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah k  
Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kor  
kota Sumenep.<sup>5</sup>

arkan dari hasil Sensus penduduk tahun 201  
menep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri da  
416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah  
012 jiwa dan 200 desa/kelurahan.

tara adalah pulau Karamian yang terletak di ke  
151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pul  
akala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari pelabua  
administratif Kabupaten Sumenep merupak  
wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep ter  
3 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah k  
Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kor  
kota Sumenep.<sup>5</sup>

arkan dari hasil Sensus penduduk tahun 201  
menep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri da  
416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah  
012 jiwa dan 1.142.012 jiwa.

tara adalah pulau Karamian yang terletak di ke  
151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pul  
akala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari pelabua  
administratif Kabupaten Sumenep merupak  
wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep ter  
3 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah k  
Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kor  
kota Sumenep.<sup>5</sup>

arkan dari hasil Sensus penduduk tahun 201  
menep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri da  
416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah  
012 jiwa dan 1.142.012 jiwa.

### 3. Agama dan Partai Politik di Sumenep

Sedangkan partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep ialah sebagai berikut; yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT), Partai nasional demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Bulan Bintang (PBB).<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Data KPU Kabupaten Sumenep, 07/12/2021.

9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi dan Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati ia merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang sebelumnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HA

9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi dan Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati ia merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Dewy Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang sebelumnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HA

9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi dan Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati ia merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Dewy Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang sebelumnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HA

9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi dan Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati ia merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang sebelumnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HA

9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi dan Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati ia merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Dewy Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang sebelumnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HANURA Kabupaten Sumenep.

Fattah Jasin- Ali Fikri didukung oleh partai politik dengan jumlah wakil di parlemen sebanyak 30 kursi, yakni PKB 10 kursi, PPP 7 Kursi, NASDEM 3 kursi, dan HANURA 3 kursi. Sedangkan Fauzi-Eva didukung oleh partai dengan keterwakilan di parlemen sebanyak 20 kursi. Partai PDIP 5 kursi, GERINDRA 6 kursi, PAN 6 kursi, PKS 2 kursi, dan PBB 1 kursi. Dengan demikian secara kekuatan dari sisi jumlah keterwakilan di legislatif, Fattah Jasin-Ali Fikri lebih kuat dibanding Fauzi-Eva. Fattah Jasin-Ali Fikri unggul 10 kursi dibanding Fauzi-Eva.<sup>11</sup> Hanya saja yang perlu digaris bawahi, bahwa dalam sirkulasi politik di Madura, termasuk di Sumenep, kekuatan parpol di kursi parlemen bukanlah satu-satunya variable penentu. Ada hal lain yang tidak kalah penting dalam percaturan politik untuk memperebutkan kepercayaan publik, yaitu modal sosial keagamaan. Latar belakang pasangan calon yang memiliki hubungan kuat dengan struktur keagamaan, katakanlah tokoh-tokoh agama dan pesantren turut menjadi salah satu faktor penting yang juga menentukan arah politik di Kabupaten Sumenep. Dan menariknya, kedua kubu ini sama-sama diaktori oleh tokoh-tokoh pesantren. Ada nyai Eva sebagai representasi politik muslimat NU yang juga dari

<sup>11</sup>*Ibid.*



## B. Deskripsi Subjek Penelitian

Moleong mendefinisikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>15</sup> Selain itu, Spradley juga mendeskripsikan bahwa subjek penelitian adalah masyarakat setempat yang terlibat secara langsung dalam peristiwa yang diteliti dan mengetahui dengan detail tentang sesuatu yang dialaminya serta informan juga dapat menggunakan bahasa mereka untuk menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan tanpa analisis mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan tersebut.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Spradley, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta; Grasindo, 2007), 68

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh dari masyarakat Sumenep yang terlibat langsung dengan dinamika prosesi Pilkada Sumenep tahun 2020. Adapun data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah dan *stakeholder* terkait yang bersangkutan dengan penelitian tersebut serta dokumentasi berupa gambar dan arsip-arsip lainnya. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perwakilan dari masyarakat yang terlibat langsung dan memahami secara komprehensif terhadap dinamika Pilkada Sumenep tahun 2020 serta dapat memberikan informasi secara obyektif.

Adapun narasumber yang menjadi subjek penelitian ini terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 2 tokoh agama (tokoh NU dan Muhammadiyah), 2 tokoh politisi (politisi PKB dan PAN), 4 Tokoh masyarakat (guru ngaji, guru honorer, dan PNS) dan 2 masyarakat biasa (petani). Dari uraian subjek penelitian di atas, maka penulis meyakini bahwa *sample* informan tersebut dapat mewakili dan dianggap cukup untuk menjadi narasumber mengenai penelitian yang berjudul “Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020”.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala agama, serta politisi yang terlibat dalam Pilkada Sumenep 2020

Banyak cara pandang yang penulis dapat dari beberapa hasil wa

apak KH. Imam Sutaji berpendapat bahwa:

“Dalam dinamika politik Sumenep kemarin memang tidak terlepas dari tersinggungan agama. Ini peristiwa lazim yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumenep. Bahkan secara umum dapat kita lihat dalam perpolitikan nasional.”

Salah satu faktor sebenarnya mengapa komodifikasi nilai-nilai Islam itu sendiri begitu dominan digunakan oleh setiap individu maupun kelompok tertentu dalam konstelasi politik. Pertama, kultur dan budaya masyarakat Sumbawa yang sangat dipengaruhi dengan nuansa keagamaan. Kedua, posisi agama yang cenderung dominan dalam konstelasi politik.

Tragedi demikian sudah lama terjadi, karena secara kultur agama dan politik dipisahkan dan bahkan memiliki kesinambungan tersendiri. Kadang kepentingan agama bisa diperoleh dengan jalur politik, serta sebaliknya.

mam Sutaji (Ketua LDNU Kab. Sumenep), *Wawancara*, Berumbung 4 november 2021

<sup>20</sup>Jauhari (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Banlapah 21 November 2021.

## 2. Hasil Wawancara Mengenai Bagaimana Komodifikasi Agama Yang Terjadi Pada Pilkada Sumenep 2020

Pada dasarnya setelah penulis mencoba mengamati situasi hubungan agama dan politik yang terjadi pada Pilkada di Sumenep tahun 2020, cenderung terjadi pertukaran kepentingan antara agama dan politik. Ini tidak terlepas dari filosofi egoisme yang merupakan salah satu mazhab etika (filsafat moral), di mana logika egoisme ini mengambil bentuk tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah yang memberi hasil dan manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu yang lama. Turunan dari filsafat egoisme tersebut akan melahirkan ideologi hedonisme religius bagi para elite politik yang bersangkutan.<sup>22</sup> Oleh sebab itu penulis mencoba mewawancarai para narasumber berkaitan dengan Bagaimana dan seperti apa komodifikasi agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada Pilkada Sumenep tahun 2020?

<sup>21</sup>Fatmawati (Petani/Masyarakat), *Wawancara*, Lengkong 18 November 2021.

<sup>22</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 112.

Sedangkan Bapak Maswari memberikan jawaban sebagai berikut:

Dan menurut Bapak KH. Ahmad Syarqawi adalah:

Bapak Abdullah juga mengatakan bahwa:

<sup>25</sup>Ahmad Syarqawi (Tokoh Muhammadiyah Bragung), *Wawancara*, Bragung 29 Oktober 2021.

Dipertegas juga oleh pernyataan Ibu Hasanah bahwa:

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas mejadi salah satu rujukan serta bahan kajian tentang bagaimana potret Pilkada sumenep 2020 dalam bayang-bayang agama. Ini bukti nyata bahwa agama dan politik adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki peran masing-masing yang secara garis besar tujuan utamanya adalah mengatur, memberi rasa nyaman, dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi ketika para elite politik dan agama ini justru yang dipikirkan hanyalah kekuasaan semata, maka agama hanya akan menjadi alat untuk menunjang kepentingan politik belaka. Keduanya akan kehilangan nilai dan tujuannya.

<sup>27</sup>Hasanah (Ketua Muslimat NU Bragung), *Wawancara*, Bragung 19 Oktober 2021.

**KOMODIFIKASI AGAMA DI RUANG PUBLIK PADA PILKADA  
SUMENEP 2020**

Di Indonesia agama tidak hanya terkait dengan persoalan ideologi, akan tetapi juga menyangkut persoalan politik. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama bagi masyarakat Indonesia sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, termasuk politik. Dalam satu dekade terakhir, khususnya pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, masyarakat sangat antusias untuk terlibat atau sekadar mengikuti perdebatan mengenai politik Indonesia yang begitu dinamis dan terbuka. Kehadiran partai politik baru pasca orde baru melengkapi saluran politik masyarakat yang sebelumnya dikekang dan diintervensi oleh kekuatan penguasa. Era reformasi hadir dengan segala bentuk kebebasan termasuk berpolitik, siapa saja memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi termasuk mendirikan partai politik dengan berbagai dasar dan landasan ideologis. Partai politik mengusung ideologi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kekuasaan diraih dengan segala cara, bahkan agama dijadikan salah satu alat di tengah ketaatan masyarakat Indonesia terhadap agamanya. Maka muncullah kemudian

Bicara politik, Sumenep menjadi salah satu daerah yang baru saja melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 lalu. Menjadi diskursus menarik untuk dikaji karena sepanjang dekade baru kali ini partai yang memiliki simbol nasionalis justru yang menjadi pemenang pada perhelatan Pilkada Sumenep tahun 2020. Ini bukan berarti politik identitas mulai meluntur akan tetapi justru sebaliknya, wacana-wacana keagamaan tidak hanya dimainkan oleh para politisi yang berasal dari partai religius. Kini politik identitas bisa diperankan oleh siapa saja mengingat pengaruh dan daya tawarnya begitu signifikan. Sumenep 2020 lalu tidak lepas dari pergulatan tokoh-tokoh agama, secara khusus Islam. Para tokoh ini tidak hanya menjadi sebagai tempat konsultasi melainkan juga ikut andil dalam memberikan maklumat untuk menggiring massa bahkan secara terang-terangan mendampingi setiap calon dalam mimbar-mimbar dan panggung-panggung politik untuk berkampanye. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Maswari salah satu narasumber yang penulis coba simpulkan bahwa masyarakat pedesaan di Sumenep begitu sangat takdhim dengan sosok ulama, itu sebabnya opini para tokoh agama seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat pedesaan termasuk dalam hal pilihan politik.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Maswari (Guru SDN 1 Tlontoraja), *Wawancara*, Perancak 2 Desember 2021.

Menurut Edmund Husserl Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia, sehingga suatu objek ada dalam relasi kesadaran.<sup>4</sup> Untuk itu, maka penulis mengungkap fenomena dalam hal ini Pilkada Kabupaten Sumenep 2020 yang melibatkan beberapa narasumber untuk menggali suatu informasi mengenai fenomena Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu. Dari hasil wawancara penulis dengan KH. Ahmad Syarqawi, salah satu narasumber pada lampiran bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa Islam, dan beberapa terminologi yang berkaitan erat dengannya dalam kampanye politik di Pilkada sumenep tahun 2020 digunakan dalam beberapa kondisi dan bentuk.

<sup>4</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung, Widya Padjadjaran, 2009), 34-45.

## 2. Slogan

Selanjutnya ialah dalam bentuk ungkapan slogan. Setiap calon mengklaim masih memiliki silsilah dan kedekatan dengan para ulama atau kiyai. Slogan yang digunakan selalu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai keluarga santri, bukan kaum abangan. Selalu tampil dan mereproduksi diri sebagai sosok yang taat melalui berbagai ungkapannya. Dengan kefasihan melafalkan terminologi arab seperti *Insyallah*, *Subhanallah*, dan sebagainya. Padahal dalam banyak

[illegible]

### 3. Simbol

<sup>6</sup>*Ibid.*

Dari beberapa temuan dan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di halaman sebelumnya berkenaan dengan dinamika pertarungan politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep antara Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri yang secara khusus keduanya memiliki visi-misi serta slogan yang ditengarai cukup kental dengan sebuah penekanan terhadap narasi-narasi keislaman yang berbau religius, seperti halnya “Sumenep Barokah” dan “*Bismillah* Melayani”. Ini adalah indikator penting yang secara tidak langsung sebenarnya menjadi bukti sekaligus pengingat bahwa nasih begitu maraknya komodifikasi nilai-nilai Islam pada panggung-panggung politik lokal, dalam hal ini Kabupaten Sumenep.

<sup>8</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung, Widya Padjadjaran, 2009), 17.

## **B. Latar Belakang Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep 2020 Dalam Tafsir Fenomenologi Edmund Husserl**

Menurut Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu sendiri yang tampak bagi subyek.<sup>9</sup> Maka dari itu untuk mengetahui sebuah realitas penulis perlu adanya suatu subyek yang dapat menjelaskan bagaimana realitas itu terjadi, dalam hal ini fenomena Pilkada Sumenep 2020. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar jika menghubungkan antara Islam dan politik adalah mengapa wacana simbol-simbol keagamaan seringkali digunakan dalam setiap momentum Pilkada di Sumenep? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan mengenai hal ini. Dari hasil penelitian penulis ada beberapa hal yang melatarbelakangi.

## 1. Kultur dan Budaya Masyarakat Sumenep

Realitas masyarakat Sumenep secara kultur dan budaya cukup kental dengan nuansa keislaman.<sup>10</sup> Ini ditandai oleh penduduk Sumenep yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Sehingga kondisi ini mendorong para elite partai politik menggunakan isu agama sebagai salah satu metode untuk meraih dukungan masyarakat. Realitas jumlah tersebut memang memberikan peluang

<sup>10</sup>Imam Sutaji (Ketua LDNU Kab. Sumenep), *Wawancara*, Berumbung 4 november 2021.



#### 4. Sikap Apatis Masyarakat Sumenep

Sikap kritis masyarakat muslim Sumenep yang mulai memudar.<sup>13</sup> Fenomena ini justru semakin dimanfaatkan oleh para elite dan pengasong agama untuk melegalkan cara apapun demi mewujudkan kepentingan kelompoknya. Bahkan tidak mpedulikan adanya perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian uang politik (*money politic*) misalnya merupakan salah satu contoh pembodohan yang dilakukan. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat pemilih yang justru

<sup>13</sup>*Ibid.*



Sebagai penepak dan penjaga marwah Islam semestinya para pemuka agama hadir dan memberi contoh terhadap masyarakat Sumenep untuk sama-sama menjaga ajang kontestasi Pilkada Sumenep 2020 bisa berjalan dengan baik, aman, jujur dan adil. Sehingga bisa meminimalisir tindakan tercela seperti saling menyerang, menghujat, menfitnah dan mengucilkan antara partai politik, individu, kelompok, dan pendukung tiap pasangan calon. Bilamana simbolisasi Islam serta keterlibatan para pengasong agama terus menggurita dalam perpolitikan Sumenep maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana wajah demokrasi Sumenep ke depan.

<sup>15</sup>Hasanah (Ketua Muslimat NU Bragung), *Wawancara*, Bragung 19 Oktober 2021.

Meskipun elite merupakan kelompok minoritas, namun karena pengaruhnya yang cukup kuat menjadikan mereka memperoleh posisi yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan elite biasanya tidak hanya didukung oleh kharisma, tetapi juga didukung oleh kemampuan finansial. Mereka memiliki kemampuan di segala lini, hal ini kemudian yang membentuk dirinya sebagai figur atau tokoh yang dianggap mampu memberi sesuatu yang lebih terhadap masyarakat. Sehingga para elite kemudian terus melakukan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan legitimasi serta pengaruhnya dengan beragam cara termasuk rela mengeluarkan banyak dana dengan jumlah besar dalam setiap kesempatan.

Dari uraian mengenai pemikiran Edmund Husserl di atas kita dapat menemukan pokok-pokok pikiran yang kemudian menjadi dasar-dasar bagi

## 1. Manusia, Simbol dan Kebudayaan

Dalam fenomena Pilkada Sumenep 2020, budaya material adalah simbol yang bersifat fisik atau bendawi, seperti halnya pakaian koko, sorban dan peci. Budaya perilaku adalah simbol yang bersifat tindakan, seperti halnya safari pesantren dan tokoh-tokoh agama. Sedangkan budaya gagasan adalah simbol yang

[illegible]

## 2. Nilai-nilai Agama: Individual dan Kolektif

Keterlibatan simbol-simbol keagamaan pada Pilkada Sumenep 2020 lalu dapat dipandang sebagai fenomena empiris yang menyorot kelompok-kelompok tertentu serta masyarakat Sumenep untuk memberi kesan bahwa ruang-ruang keagamaan tidak hanya sekadar persoalan individu dengan Tuhannya serta tidak hanya sebatas aktivitas keruhanian belaka. Ia juga merupakan dimensi kolektif yang harus senantiasa masuk dalam ruang-ruang aktivitas sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, komodifikasi agama secara khusus Islam pada Pilkada Sumenep menjadi poin penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk tetap senantiasa dirawat, karena seringkali terbukti mengantarkan pada hasil yang memuaskan.

<sup>18</sup>*Ibid*, 293.

Agama pada dasarnya juga merupakan perangkat simbol-simbol. Nilai-nilai agama dapat menjadi objek pemaknaan siapa saja, sehingga ia dapat bermakna positif maupun negatif. Dari sudut pandang tertentu nilai-nilai keagamaan kemudian dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol mengenai dunia empiris dan tidak empiris yang diyakini akan kebenaran eksistensial dan substansialnya serta menjadi sarana manusia dalam menghadapi lingkungan dari mempertahankan hidupnya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>*Ibid.*

## PENUTUP

Penggunaan agama dalam dinamika politik Sumenep tidak lepas dari realitas para pemilih yang masih menempatkan agama pada posisi puncak siklus kehidupan sosialnya. Mayoritas masyarakat Sumenep melihat agama sebagai suatu pusat atau rujukan utama yang memiliki tata nilai tidak tergantikan.

2. Komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep 2020 dalam perspektif fenomenologi Edmun Husserl dapat dipandang sebagai suatu realitas yang normatif. *Pertama*, kesadaran manusia pada prinsipnya tidak akan pernah lepas dari korelasi simbol dan budayanya, maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya dalam hal ini penguasaan terhadap politik praktis, ia harus mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri sebagai simbol dan

## B. Saran

## Saran

Tanpa kita sadari, politisasi agama sebenarnya secara tidak langsung telah mengakibatkan degradasi nilai-nilai politik dan agama itu sendiri. Karena pada hakikatnya jalan dari kedua *variable* tersebut adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan berkeadilan. Maka dari itu perlunya kesadaran dari setiap individu maupun kelompok terutama terhadap para elite politik untuk lebih bijaksana lagi dalam hal beragama dan berpolitik. Dengan demikian tokoh-tokoh tersebut diharap bisa mengejewantahkan agama dan politik ke level yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi. Maka dari itu

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Andi Mappetahang, Fatwa. *Demi Sebuah Rezim*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 32.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Clark, Moustakas. *Phenomenological Research Methods*, California: Sage, 1987.
- Drijarkara, N. *Percikan Filsafat*, Jakarta: PT Pembangunan, 1989.
- Effendi, Rahmat. *Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 2003.
- Evans, Malcolom. *Manual on the wearing of religious Symbols in Public Areas*. France Publisng: Council of Europe, 2009.
- Fachrul Nurhadi, Zikri. *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Fakhruroji, Mohammad. *Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama*. Bandung: UIN SGD Bandung, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*, jilid I, II. Yogyakarta: Andi Offsed, 1994.
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Littlejohn, Stephen W. Karen A. Foss, *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mahfudh MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Yogyakarta: Gramedia, 2001.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.



